

STRATEGI PENINGKATAN LITERASI POLITIK PEMILIH PEMULA BERBASIS DIGITAL DI KABUPATEN KUBU RAYA

Syarifah Nurma Afhiani¹⁾, Grace Melisa Putri²⁾, Yesika³⁾

¹⁻³ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tanjungpura

Email: syarifah.nurma@fisip.untan.ac.id; gracemelisaputri@gmail.com; yesjessica669@gmail.com

Artikel histori:

Submit: 08-11-2024

Revisi: 02-12-2024

Diterima: 04-12-2024

Terbit: 31-12-2024

Kata Kunci:

strategy of improvement,
political literacy,
digital

Korespondensi:

syarifah.nurma@fisip.untan.ac.id

Abstract: *Digital-based political literacy is the ability of individuals to access, evaluate, understand, and use political information presented through digital media critically and effectively. Digital literacy in the Batu Ampar area is quite difficult to develop due to remote terrain, limited internet access and a lack of staff to educate or provide assistance to first-time voters. The aim of this research on digital-based political literacy is to analyze strategies to enhance the understanding and skills of young voters as first-time voters in accessing, evaluating, and using political information, as well as encouraging individuals to participate actively in political processes. The method used in this study is descriptive qualitative, focusing on analyzing strategies to improve political literacy for first-time voters in the use of digital media. The results of the research indicate five strategies to enhance digital-based political literacy for young generations as first-time voters in Kubu Raya Regency: 1) digital literacy corner programs; 2) access to information through credible media; 3) technology volunteers or digital ambassadors; 4) private sector collaboration through wireless information technology; 5) development of digital political literacy materials for young voters.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dapat menghadirkan peluang besar, sekaligus tantangan yang nyata bagi sebagian masyarakat. Kesenjangan akses internet berpengaruh pada kemampuan masyarakat untuk menikmati manfaat literasi digital. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan infrastruktur. Di daerah terpencil, akses internet masih menjadi barang langka. Jaringan yang lambat atau bahkan tidak tersedia membuat masyarakat kesulitan terhubung

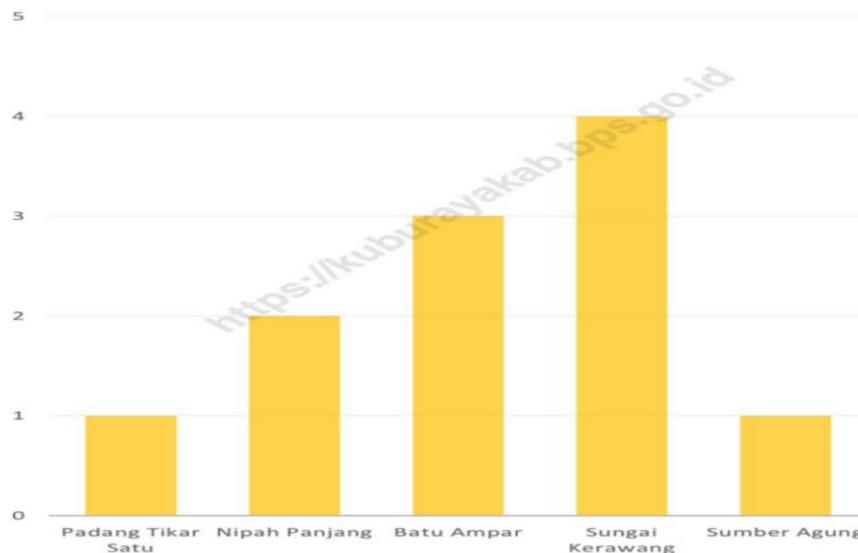
dengan dunia digital. Bagi mereka yang kurang mendapatkan pendidikan, literasi digital pun menjadi hal yang asing. Banyak yang belum memahami cara menggunakan perangkat digital, apalagi memanfaatkannya untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Kesenjangan akses teknologi menjadi masalah utama, terutama di daerah terpencil yang minim infrastruktur internet, ditambah keterbatasan ekonomi yang membuat banyak keluarga tidak mampu membeli perangkat digital. Selain itu, harga perangkat seperti smartphone atau laptop yang masih tergolong mahal menjadi penghalang bagi banyak keluarga untuk memiliki akses ke teknologi ini.

Kondisi ekonomi dan pendidikan masyarakat di wilayah terpencil juga turut memperburuk situasi. Mereka semakin sulit mengikuti perkembangan teknologi tanpa akses internet yang memadai. Selain itu, kurangnya pendidikan literasi digital di sekolah dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kemampuan ini membuat banyak orang kesulitan mengakses manfaat teknologi secara optimal. Maraknya hoaks dan disinformasi juga menjadi ancaman serius, di mana banyak individu tidak memiliki kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis. Masalah-masalah tersebut turut menyebabkan kesenjangan digital yang semakin lebar, produktivitas yang menurun dan penyebaran informasi palsu yang terus meningkat.

Literasi politik mencakup pemahaman tentang bagaimana informasi politik disampaikan dan diproses dalam ranah digital, serta bagaimana cara mengidentifikasi informasi yang akurat dan terpercaya di tengah banyaknya konten politik yang tersedia di internet (Yuliandari et al., 2023). Melalui pemahaman dan pengembangan literasi politik yang kuat, individu dapat menjadi lebih terampil dalam menyaring informasi politik, mengidentifikasi manipulasi dan disinformasi, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses politik secara online yang terhubung ke internet (Ahmady et al., 2024). Literasi melibatkan keterampilan analisis kritis untuk mengevaluasi konten politik yang ditemui online, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi dan menanggapi disinformasi dan misinformasi (Sabrina, 2019). Selain itu, literasi politik digital juga melibatkan pemahaman tentang bagaimana teknologi digital memengaruhi proses politik secara lebih luas. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana algoritma platform digital memengaruhi tampilan konten politik, bagaimana kampanye politik menggunakan media sosial dan alat digital lainnya untuk mempengaruhi opini publik, serta kesadaran tentang risiko keamanan dan privasi yang terkait dengan partisipasi politik online. Literasi politik berbasis digital membantu individu untuk menjadi warga negara yang lebih terinformasi, kritis, dan aktif dalam dunia politik yang semakin terhubung secara digital (Rosit et al., 2023).

Ketidakmerataan akses internet tentu memberikan dampak bagi kehidupan Masyarakat (Kurniawatik et al., 2021). Ketimpangan akses internet merujuk pada disparitas atau perbedaan dalam kemampuan individu atau kelompok untuk mengakses dan memanfaatkan layanan internet. Ini dapat terjadi baik di tingkat geografis, ekonomi, maupun sosial (Tamrin et al., 2024). Secara geografis, ketimpangan akses internet mengacu pada perbedaan dalam ketersediaan infrastruktur telekomunikasi antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah yang maju secara teknologi dan yang kurang berkembang. Daerah yang terpinggirkan atau terpencil seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan koneksi internet yang handal dan cepat, dibandingkan dengan daerah yang lebih maju secara teknologi. Salah satu wilayah yang terdapat kesenjangan akses adalah

Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu raya yang merupakan wilayah terjauh dari Ibu kota. Literasi politik berbasis digital membantu individu untuk menjadi warga negara yang lebih terinformasi, kritis, dan aktif dalam dunia politik yang semakin terhubung secara digital. Hal ini dapat terlihat dari menara telepon seluler yang terpasang hanya di beberapa desa.



Gambar 1. Jumlah Menara Telpon Seluler Menurut Desa Di Kecamatan Batu Ampar

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa dari 15 desa yang terdapat di Kecamatan Batu Ampar, hanya 5 desa yang memiliki menara telpon seluler (BPS, 2023). Kondisi ini mencerminkan ketimpangan akses terhadap teknologi, terutama internet, yang berkontribusi pada rendahnya tingkat literasi digital di sebagian besar wilayah. Ketimpangan ini berdampak signifikan pada kelompok-kelompok rentan, seperti kaum lanjut usia, penyandang disabilitas, dan pemilih muda dengan literasi digital yang rendah. Mereka menghadapi kesulitan besar dalam mengakses internet dan memanfaatkan layanan-layanan digital yang semakin penting di era ini. Ketimpangan akses internet mencerminkan ketidaksetaraan dalam kemampuan individu atau kelompok untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat memperdalam kesenjangan sosial dan politik.

Tanpa infrastruktur yang memadai, masyarakat di desa-desa tidak hanya kehilangan kesempatan untuk terhubung dengan dunia digital, tetapi juga terpinggirkan dalam hal pendidikan, ekonomi, dan layanan kesehatan berbasis digital. Kesenjangan ini membawa dampak terutama bagi pemilih pemula dari keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka sering tertinggal dalam mengakses informasi terbaru dan akses ke layanan pemerintah yang mulai beralih ke platform digital. Selain itu kondisi geografis desa yang beragam, seperti daerah berbukit atau pulau-pulau kecil, semakin memperumit penyebaran infrastruktur digital. Akibatnya, kesenjangan antara masyarakat yang tinggal di pusat kota dengan mereka yang berada di pinggiran semakin melebar. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk m bagaimana strategi peningkatan literasi politik berbasis digital bagi masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menjawab penelitian ini. Penelitian kualitatif tersebut disesuaikan dengan penelitian konstruktivisme (Moleong, 2018). Penelitian ini memilih cara berpikir kausal untuk memahami dan mencari tahu tentang pengetahuan dan wawasan dari fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, wawancara mendalam mengenai pemahaman, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi pemilih pemula dalam mengakses dan memverifikasi informasi politik secara digital. Wawancara dilakukan kepada pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan pengamat politik guna memperoleh perspektif yang lebih luas untuk melengkapi survei dan wawancara, metode observasi partisipatif dan studi dokumentasi bisa diterapkan. Instrumen penelitian terdiri dari panduan observasi dan panduan wawancara yang dirancang untuk menggali beberapa aspek kunci, termasuk pemahaman pemilih pemula tentang proses politik, perubahan sikap dan perilaku politik setelah mengikuti program, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pendidikan politik.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Wawancara mendalam dilakukan dengan pemilih pemula berusia 17-21 tahun yang aktif memanfaatkan media digital untuk mengakses informasi politik, pendidik yang terlibat dalam program literasi politik, mewawancarai Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kab. Kubu Raya serta tokoh masyarakat yang menjadi informan kunci. Wawancara tersebut bertujuan menggali pengalaman, pandangan, serta tantangan yang dihadapi partisipan dalam memahami literasi politik melalui platform digital. Observasi partisipatif dilakukan dengan terlibat langsung dalam kegiatan literasi politik berbasis digital. Data juga dikumpulkan melalui observasi partisipatif di berbagai kegiatan pendidikan politik yang diadakan di sekolah-sekolah dan komunitas lokal lainnya guna melihat interaksi dan dinamika perkembangan literasi politik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan langkah-langkah yang sistematis. Proses dimulai dengan reduksi data, yaitu menyaring dan memilih informasi yang relevan sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data diberi kode atau kategori untuk mengidentifikasi tema utama, seperti akses informasi digital, pemahaman literasi politik, tantangan, dan dampak dari literasi politik digital. Analisis tematik kemudian dilakukan untuk menemukan pola. Setelah itu, untuk memastikan validitas hasil, peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Literasi Politik Berbasis Digital di Kabupaten Kubu Raya

Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya peningkatan literasi digital di daerah terpencil. Salah satu Kecamatan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah pemilih pemula di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya. Literasi politik digital adalah kemampuan individu untuk memahami, mengakses, mengevaluasi, dan berpartisipasi dalam proses politik melalui platform digital dan media online. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dari pihak terkait proses untuk melakukan literasi digital ke wilayah Batu Ampar cukup sulit karena medan yang jauh, akses internet terbatas serta kurangnya

tenaga untuk mengedukasi atau memberikan pendampingan kepada pemilih pemula. Minimnya program pendidikan politik formal dan informal membuat masyarakat kurang memiliki pengetahuan dasar tentang hak-hak politik, proses pemilihan, dan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari (Haryani et al., 2024). Oleh karena itu, strategi peningkatan literasi politik berbasis digital di Kubu Raya diperlukan sebagai penguatan keterampilan literasi politik berbasis digital di daerah-daerah serta mengatasi hambatan-hambatan struktural yang ada. Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya peningkatan literasi digital di daerah terpencil.

1. Infrastruktur jaringan internet yang terbatas. Banyak daerah terpencil, khususnya yang berada di wilayah pegunungan, pulau-pulau kecil, atau kawasan dengan medan geografis yang sulit dijangkau, belum memiliki akses ke jaringan internet yang memadai. Padahal, internet merupakan salah satu pilar utama untuk mengakses berbagai layanan digital, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, dan informasi politik. Keterbatasan infrastruktur ini menghambat masyarakat di daerah terpencil untuk memanfaatkan teknologi secara optimal.
2. Biaya pembangunan infrastruktur teknologi yang tinggi sering kali menjadi penghambat utama dalam mengembangkan akses internet di daerah-daerah terpencil. Pembangunan jaringan serat optik atau menara telekomunikasi di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau memerlukan investasi besar, sementara populasi yang dilayani sering kali terbatas. Akibatnya, penyedia layanan internet atau telekomunikasi swasta kurang tertarik untuk melakukan ekspansi ke daerah-daerah tersebut, mengingat potensi keuntungan yang kecil dibandingkan dengan investasi yang dibutuhkan.
3. Rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat di daerah terpencil juga menjadi tantangan signifikan. Meski akses internet berhasil diperluas, masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan teknologi mungkin menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan layanan digital. Literasi teknologi yang rendah membuat banyak orang di daerah terpencil merasa canggung atau takut untuk menggunakan perangkat digital, sehingga potensi penuh dari akses teknologi tidak dapat dimaksimalkan oleh masyarakat untuk berpikir kritis dalam menyaring informasi, terutama mengingat banyaknya berita bohong (hoaks) yang tersebar di media digital.

Disinyalir, tantangan literasi politik yang terjadi di Kecamatan Batu Ampar adalah akses internet yang lambat atau bahkan tidak tersedia di beberapa wilayah menjadi penghalang utama. Tanpa koneksi yang memadai, masyarakat sulit mengakses informasi atau menggunakan teknologi untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, atau pengembangan usaha. Selain itu, minimnya kepemilikan perangkat seperti smartphone atau komputer juga memperparah kesenjangan digital. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan digital di kalangan masyarakat. Tidak sedikit yang belum memahami cara menggunakan teknologi secara bijak dan produktif, apalagi menyaring informasi yang valid di tengah derasnya arus berita di internet.

Selain itu, tantangan yang menjadi penghambat literasi politik digital adalah rendahnya minat masyarakat untuk berliterasi dan keterbatasan pemahaman masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif untuk mendapatkan informasi politik yang valid dan terpercaya. Tidak meratanya jaringan internet di Kab. Kubu Raya terutama di desa-desa terpencil di Kecamatan

Batu Ampar semakin membuat potensi literasi politik Masyarakat semakin rendah. Kurangnya akses internet juga mempengaruhi peluang masyarakat untuk mendapatkan informasi politik melalui media sosial, situs web berita, dan platform diskusi online melalui media yang berkeditabilitas (Hakim & Pitoyo, 2022).

Informasi palsu dan hoaks menjadi ancaman serius bagi mereka yang belum memiliki kemampuan kritis dalam menganalisis data. Banyak masyarakat yang terjebak dalam disinformasi, yang sering kali berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat. Di luar itu, sebagian warga masih memegang teguh cara-cara tradisional, yang membuat mereka enggan beradaptasi dengan teknologi modern. Sementara itu, sekolah dan lembaga pendidikan di daerah ini juga menghadapi tantangan besar. Kurikulum yang mengintegrasikan literasi digital belum sepenuhnya diterapkan, sementara guru-guru sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengajarkan teknologi kepada siswa.

Kelompok pemuda menjadi salah satu kelompok yang menentukan kesuksesan dalam partisipasi pilkada pada tahun 2024 di Kecamatan Batu Ampar. Sedangkan tingkat literasi politik kelompok pemula di Kecamatan Batu Ampar ini masih sangat rendah. Di era digital, literasi politik semakin tergantung pada literasi digital, yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif (Siregar & Manurung, 2023). Berikut ini data jangkauan akses telekomunikasi di desa-desa Kecamatan Batu Ampar:

Tabel 1
Jangkauan Akses Telekomunikasi Kecamatan Batu Ampar

No	NAMA DESA	AKSES INTERNET	MENARA SELULER
1	Tanjungberingin	tidak	tidak ada
2	Batu Ampar	ya	ada
3	Teluknibung	tidak	tidak ada
4	Padang Tikar Satu	ya	ada
5	Padang Tikar Dua	ya	ada
6	Tasik Malaya	tidak	tidak ada
7	Sungaibesar	tidak	tidak ada
8	Sungaijawi	ya	ada
9	Nipah Panjang	tidak	tidak ada
10	Ambarawa	tidak	tidak ada
11	Tanjungharapan	tidak	tidak ada
12	Sungai kerawang	ya	ada
13	Sumber Agung	ya	ada
14	Muara Tiga	tidak	tidak ada
15	Medan Mas	tidak	tidak ada

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti

Peneliti memanfaatkan aplikasi pendukung seperti *microsoft excel* dalam mengelola data penelitian ini. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah data desa secara sistematis hingga menemukan data yang relevan dengan penelitian serta visualisasi khususnya terkait data ketersediaan internet di desa-desa wilayah Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa hanya 6 desa sudah menerima jaringan internet dan 9 belum mendapatkan akses internet. Hal ini menunjukkan adanya gap literasi digital yang perlu diatasi dengan strategi yang lebih sistematis. Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan Kec. Batu Ampar cenderung memiliki akses terbatas ke teknologi, dan literasi digital lebih rendah dibandingkan masyarakat di perkotaan.

Berdasarkan survei dan wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa masyarakat Kubu Raya masih cenderung pasif dalam mengakses informasi politik melalui media digital. Sebagian besar masyarakat lebih sering mendapatkan informasi dari sumber tradisional, seperti televisi dan radio, karena mereka memiliki keterbatasan akses ke internet. Keterbatasan pemahaman dalam mengevaluasi informasi politik di media sosial juga menjadi masalah, di mana banyak masyarakat yang mudah terpengaruh oleh berita hoaks atau informasi yang tidak akurat. Program edukasi literasi digital harus mempertimbangkan kebutuhan dan keterbatasan masing-masing kelompok usia, serta menyediakan pendekatan yang berbeda untuk kelompok yang berbeda. Dalam konteks literasi politik, edukasi literasi digital juga harus menghadapi tantangan kesenjangan digital (Asrun et al., 2023).

Masyarakat Kubu Raya menghadapi tantangan dalam memahami peran mereka dalam sistem demokrasi. Minimnya program pendidikan politik formal dan informal membuat masyarakat kurang memiliki pengetahuan dasar tentang hak-hak politik, proses pemilihan, dan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari (Arrianie, 2021). Oleh karena itu, strategi peningkatan literasi politik berbasis digital di Kubu Raya harus mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi masyarakat setempat, serta mengatasi hambatan-hambatan struktural yang ada. Strategi literasi politik berbasis digital harus mencakup program yang dirancang untuk mendukung kelompok ini dalam belajar menggunakan teknologi dengan lebih percaya diri, serta mengakses informasi politik yang valid (Muhazir, 2020). Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi, dan hal ini bisa menciptakan kesenjangan dalam hal akses terhadap informasi politik.

Strategi Peningkatan Literasi Politik Berbasis Digital bagi Pemilih Pemula

Peningkatan akses teknologi di daerah terpencil merupakan langkah penting untuk mengatasi kesenjangan digital dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Meskipun ada tantangan besar terkait infrastruktur dan literasi, dengan kemajuan teknologi dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat lokal, solusi yang efektif dapat ditemukan (Veronika et al., 2022). Akses teknologi yang merata tidak hanya akan membuka peluang baru bagi masyarakat di daerah terpencil, tetapi juga akan memperkuat partisipasi mereka dalam ekonomi, pendidikan, dan politik di era digital (Mukarom, 2016). Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai upaya perlu dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan akses teknologi di daerah terpencil. Terdapat 5 strategi dalam meningkatkan literasi politik Masyarakat berbasis digital yaitu:

1. Program Pojok Literasi Digital

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip), berkomitmen untuk meningkatkan literasi di masyarakat dalam konteks era digital dengan menyediakan berbagai fasilitas bacaan dalam bentuk digital serta telah mendapatkan dukungan dari Perpustakaan Nasional untuk memperluas jangkauan akses literasi. Upaya untuk mendorong program literasi berbasis digital semakin ditingkatkan, sebagai respons terhadap perubahan kebiasaan membaca masyarakat yang kini lebih banyak menggunakan media digital di tengah kemajuan teknologi. Untuk itu, pemerintah daerah meluncurkan berbagai program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan literasi digital, salah satunya dengan mendirikan Pojok Literasi Digital dan meluncurkan mobil perpustakaan keliling digital yang ditujukan untuk menjangkau desa-desa yang sulit diakses oleh internet dan listrik, khususnya di kawasan pedesaan dan perairan. Mobil perpustakaan ini, tersebar di 9 kecamatan dan 123 Desa yang dapat dijangkau.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program ini, beberapa Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan perpustakaan di Kubu Raya menyadari pentingnya kerjasama antara perpustakaan desa, TBM, dan perpustakaan sekolah dalam memperkuat dan mempermudah akses literasi digital serta mengembangkan budaya literasi digital. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki rencana untuk mendirikan perpustakaan di setiap desa sebagai langkah jangka panjang untuk memperluas akses terhadap literasi. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk TBM dan perpustakaan sekolah, sehingga kolaborasi ini akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pengembangan literasi di seluruh wilayah Kubu Raya, khususnya di Kec. Batu Ampar.

2. Akses Informasi melalui Media Berkredibilitas

Program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Misalnya, pelatihan literasi digital dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat setempat. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada cara penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup edukasi mengenai keamanan siber, cara mengakses informasi politik yang valid, serta pemanfaatan teknologi untuk pengembangan ekonomi lokal. Program peningkatan literasi digital yang difokuskan pada kelompok pemilih pemula sangat penting untuk membekali generasi muda dengan keterampilan digital yang relevan dalam memahami proses demokrasi dan memilih dengan bijak. Mengingat pemilih pemula umumnya merupakan kelompok usia remaja dan dewasa muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya, pelatihan literasi digital bisa dirancang untuk membantu mereka mengenali informasi politik yang valid dan membedakannya dari berita palsu atau hoaks.

Program ini dapat mencakup materi tentang bagaimana memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya secara kritis, sehingga mereka mampu menyaring informasi, mengenal latar belakang kandidat secara objektif, dan memahami isu-isu politik secara lebih mendalam. Literasi politik digital bagi pemilih pemula bisa berbentuk berbagai kegiatan edukatif dan interaktif yang membantu mereka memahami lanskap politik dan proses pemilihan dengan baik. Salah satu bentuknya adalah pelatihan atau lokakarya interaktif yang mengajarkan cara mengidentifikasi informasi politik yang valid di internet, mengenali berita palsu, serta membedakan opini dari fakta. Melalui simulasi atau studi kasus, pemilih pemula dapat belajar menganalisis informasi mengenai

kandidat atau partai politik, memverifikasi sumber berita, dan memahami isu-isu utama yang relevan dalam pemilihan

Selain itu, penggunaan platform digital seperti aplikasi atau situs web edukatif yang secara khusus dirancang untuk pemilih pemula dapat menjadi alat literasi politik digital yang efektif. Aplikasi ini bisa menyediakan informasi ringkas mengenai profil kandidat, program kerja, serta posisi mereka terkait isu-isu penting yang sedang dihadapi negara atau daerah misalnya melalui web bijak memilih. Fitur lain yang dapat ditambahkan adalah forum diskusi, kuis, dan video pendek edukatif yang menjelaskan konsep dasar demokrasi, pentingnya hak suara, serta bagaimana teknologi dapat digunakan secara bijak dalam mengikuti dan memahami kampanye politik yang diproduksi oleh KPU, lembaga pemerintahan, atau media berkredibilitas tinggi, seperti video yang membahas tahapan pemilu, cara memeriksa kredibilitas informasi, atau profil singkat kandidat, dapat membantu menyampaikan informasi yang padat secara mudah dicerna. adanya platform digital yang interaktif dan mudah diakses, pemilih pemula dapat dengan lebih mudah meningkatkan literasi politiknya, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pemilihan dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik.

3. Relawan Teknologi Atau Duta Digital

Relawan dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat di daerah terpencil. Berkolaborasi dengan influencer atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di media sosial dapat membantu menyebarkan informasi edukatif dengan lebih cepat dan luas. Influencer yang dipercaya oleh komunitasnya memiliki daya tarik yang besar dalam mempengaruhi sikap dan perilaku pengikutnya. Dalam konteks literasi politik, kolaborasi dengan influencer lokal atau tokoh politik yang memiliki reputasi baik dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di kalangan masyarakat.

Relawan ini dapat mengajarkan keterampilan dasar menggunakan perangkat teknologi, membantu masyarakat mengakses layanan publik secara online, serta memberikan edukasi mengenai potensi ekonomi digital, seperti berjualan secara online atau memanfaatkan platform e-commerce. Peran relawan teknologi atau duta digital sangat penting dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat di daerah terpencil, terutama dalam hal literasi digital dan politik. Relawan ini berfungsi sebagai jembatan pengetahuan antara masyarakat dan teknologi dengan mengajarkan keterampilan dasar menggunakan perangkat elektronik, seperti smartphone atau komputer. Mereka juga membantu masyarakat memahami cara mengakses informasi politik yang akurat dan terpercaya di internet, sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat mengikuti perkembangan politik nasional dan lokal dengan baik, meskipun keterbatasan informasi mungkin menjadi tantangan bagi mereka.

Selain itu, para relawan juga memberikan edukasi politik yang dirancang untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Relawan dapat menjelaskan konsep-konsep dasar seperti hak dan kewajiban sebagai warga negara, arti penting pemilu, dan bagaimana memilih dengan bijak berdasarkan informasi yang valid. Melalui kegiatan edukatif ini, masyarakat terpencil tidak hanya semakin melek teknologi, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peran politik dalam kehidupan mereka. Dengan adanya dukungan dari relawan teknologi, masyarakat di daerah terpencil diharapkan menjadi lebih kritis, aktif,

dan siap berpartisipasi dalam pemilu atau kegiatan politik lainnya secara bijak dan berdasarkan informasi yang benar.

4. Kolaborasi Sektor Swasta melalui Teknologi Informasi Nirkabel

Di banyak daerah terpencil, teknologi nirkabel juga dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif. Penggunaan teknologi 4G LTE atau bahkan 5G melalui jaringan nirkabel dapat menyediakan akses internet dengan kecepatan tinggi tanpa memerlukan pembangunan infrastruktur kabel yang mahal dan rumit. Selain itu, penggunaan perangkat seperti orbit atau Wi-Fi hotspot bergerak lainnya yang dapat dihubungkan ke satelit atau jaringan nirkabel juga memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses internet secara lebih fleksibel. Pemanfaatan teknologi nirkabel dan energi terbarukan menjadi solusi strategis untuk menghadirkan akses internet di daerah terpencil yang masih minim infrastruktur. Di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau infrastruktur kabel.

Teknologi nirkabel seperti 4G LTE dan 5G dapat menjadi alternatif jangka pendek yang efektif, memberikan akses internet dengan kecepatan tinggi tanpa memerlukan biaya besar untuk pembangunan kabel serat optik. Selain itu, dengan memanfaatkan perangkat seperti Wi-Fi hotspot bergerak yang terhubung ke satelit atau jaringan nirkabel, masyarakat di daerah terpencil dapat mengakses internet kapan saja, di mana saja, secara lebih fleksibel. Teknologi ini memudahkan untuk terhubung dengan informasi, layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital yang sebelumnya sulit dijangkau.

Penyedia layanan telekomunikasi swasta dapat diberikan insentif berupa subsidi atau pembebasan pajak untuk membangun infrastruktur teknologi di daerah terpencil. Kolaborasi dengan sektor swasta, terutama perusahaan teknologi, dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperluas jangkauan program literasi digital di seluruh wilayah. Dalam konteks ini, penyedia layanan internet memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya dalam menyediakan akses internet, tetapi juga dalam mendukung program-program edukasi yang bertujuan meningkatkan keterampilan digital masyarakat. Dengan menjalin kemitraan dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah, perusahaan-perusahaan ini dapat merancang program yang menargetkan daerah-daerah terpencil, di mana akses terhadap teknologi dan informasi masih terbatas. Melalui kolaborasi ini, masyarakat di daerah tersebut dapat mendapatkan peluang untuk belajar dan berkembang dalam dunia digital.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh penyedia layanan internet adalah dengan memperluas jaringan mereka ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya tidak terjangkau. Dengan menginvestasikan dalam infrastruktur nirkabel dan memperluas cakupan jaringan, mereka dapat memberikan akses internet yang stabil dan cepat kepada masyarakat setempat. Selain itu, mereka juga dapat mengadakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan di komunitas lokal, yang mencakup materi-materi penting tentang penggunaan teknologi, keamanan siber, dan cara mengakses informasi yang valid di dunia maya.

5. Pengembangan Materi Literasi Politik Digital di Sekolah Menengah Atas

Di era digital saat ini, penggunaan media sosial sebagai alat untuk berpartisipasi dalam diskusi politik tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, materi pendidikan harus mencakup pengajaran tentang etika digital dan cara menggunakan media sosial secara

bijak untuk menghadapi dinamika politik. Siswa juga harus dilatih untuk menghargai pendapat orang lain dan berargumentasi secara sehat. Kegiatan diskusi dan debat di kelas akan memberikan mereka ruang untuk melatih keterampilan komunikasi dan berpikir kritis, yang esensial dalam proses pengambilan keputusan politik. Langkah strategis untuk membekali siswa dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran mereka sebagai pemilih di masa depan. Pemilih pemula perlu diperkenalkan pada konsep literasi politik, termasuk definisi dan pentingnya dalam konteks demokrasi. Melalui pemahaman tentang sejarah dan fungsi sistem politik di Indonesia, sehingga mereka akan menyadari betapa krusialnya peran mereka sebagai pemilih.

Literasi politik menjadi kebutuhan penting dalam upaya membangun kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan penduduk desa (et al., 2020). Selanjutnya, pendidikan mengenai sumber informasi yang terpercaya sangat penting dalam dunia yang dipenuhi berita hoax. Pemilih dapat membedakan antara sumber informasi yang kredibel dan yang tidak, serta dilengkapi dengan keterampilan mencari dan menganalisis berita. Dengan kemampuan ini, mereka diharapkan dapat mengevaluasi informasi yang diterima, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi saat memilih di masa depan. Kegiatan ini tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan mereka, tetapi juga melatih kemampuan analisis dan komunikasi. Dengan implementasi materi literasi politik dan digital yang tepat dalam kurikulum, diharapkan siswa akan tumbuh menjadi generasi pemilih yang lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, siap menghadapi tantangan demokrasi di masa depan.

Di era teknologi yang semakin maju, literasi digital menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Namun, berbagai masalah masih menghambat pemerataan kemampuan berliterasi di tengah masyarakat. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan akses teknologi. Di banyak daerah, terutama wilayah terpencil, infrastruktur internet belum memadai. Masyarakat di sana sering kali tidak memiliki akses yang sama dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Selain itu, keterbatasan ekonomi membuat banyak keluarga tidak mampu membeli perangkat seperti smartphone atau komputer, sehingga semakin memperlebar kesenjangan digital. Politik memiliki peran krusial dalam mendorong kemajuan literasi digital suatu negara. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sangat menentukan sejauh mana akses, pendidikan, dan keamanan digital dapat dijangkau oleh Masyarakat (Mufti, 2019). Peran komunikasi politik perlu dijalankan oleh berbagai elemen politik dalam suatu bangsa, termasuk oleh struktur politik dan kelompok sasaran konstituen (Gunanto et al., 2023). Misalnya, jika pemerintah memiliki komitmen untuk mengembangkan literasi digital, mereka akan memasukkan program literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan nasional, mendukung pelatihan guru, dan menyediakan dana untuk pengembangan keterampilan digital sejak dini. Infrastruktur teknologi juga merupakan salah satu aspek penting yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik. Tanpa dukungan dana untuk memperluas jaringan internet di daerah terpencil, kesenjangan digital akan terus terjadi, membatasi akses sebagian besar masyarakat untuk memperoleh literasi digital yang memadai (Purnamawati & Fauzi, 2023).

Selain itu, regulasi terkait keamanan siber turut mempengaruhi literasi digital masyarakat. Pemerintah yang memperkuat keamanan digital dengan kebijakan privasi yang ketat, misalnya, memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menggunakan teknologi, sehingga mereka dapat lebih percaya diri dalam beraktivitas dan belajar di dunia digital. Kemajuan literasi digital juga membuka jalan bagi partisipasi politik digital, seperti melalui e-voting dan kampanye media sosial, yang memungkinkan warga untuk lebih terlibat dalam proses demokrasi. Literasi digital memainkan peran penting dalam memerangi hoaks dan misinformasi yang dapat mempengaruhi stabilitas politik.

KESIMPULAN

Strategi peningkatan literasi politik berbasis digital di Kabupaten Kubu Raya merupakan upaya penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi terutama bagi pemilih pemula dalam proses demokrasi. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat lima strategi peningkatan literasi berbasis digital untuk generasi muda sebagai pemilih pemula di Kab. Kubu Raya. Hasil penelitian menunjukkan lima strategi peningkatan literasi politik berbasis digital pada generasi muda sebagai pemilih pemula di Kabupaten Kubu Raya: 1) program pojok literasi digital; 2) akses informasi melalui media yang kredibel; 3) relawan teknologi atau duta digital; 4) kolaborasi sektor swasta melalui teknologi informasi nirkabel; 5) pengembangan materi literasi politik digital bagi pemilih muda.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, swasta, dan masyarakat mengadakan program edukasi dalam meningkatkan literasi politik berbasis digital, diharapkan pemilih pemula di Kubu Raya dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum, sehingga mendorong terciptanya demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Pelatihan yang khusus menyasar kelompok ini. Pelatihan tersebut dapat mencakup cara mencari informasi yang valid, memahami berita politik, serta mengenali hoaks. Selain itu, penting untuk menyediakan sumber informasi yang terpercaya, seperti portal atau website yang menyajikan data akurat tentang calon, program partai, dan berita politik terkini. Penggunaan media sosial juga dapat dimaksimalkan sebagai alat untuk menyebarkan informasi edukatif yang menarik.

REFERENSI

- Ahmady, I., Rasanjani, S., & Putri, A. (2024). Penyediaan Platform Digital dan Pendidikan Politik Pemilih Pemula Demi Sukses Pemilu 2024. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7, 125-135. <https://doi.org/https://doi.org/10.31960/caradde.v7i1.2472>
- Arriane, L. (2021). *KOMUNIKASI POLITIK (Dramatisme dan Pencitraan Politisi di Panggung Politik)* (Y. S. Hayati (ed.); Edisi 1). PT Rajagrafindo Persada.
- Asrun, Muhammad Najib Husain, & Iba, L. (2023). Strategi Politik Kemenangan Rusman Emba Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabuapten Muna Tahun 2020. *JAPMAS: Jurnal Politik Dan Demokrasi*, 1(2), 90-96. <https://doi.org/10.52423/japmas.v1i2.12>
- Darajat, D. M., & Muhtadi, M. (2020). Strategi Literasi Politik Untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Sosio Informa*, 6(3), 305-317. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2422>
- Gunanto, D., Murod, M., & Irawan, B. (2023). Literasi Politik dan Sadar Pemilu Bagi Perempuan (Pimpinan Cabang Aisyiyah Ciseeng Kabupaten Bogor). *Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 437-445. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i2.7402>
- Hakim, L., & Pitoyo, P. (2022). Pengaruh Literasi Digital dan Literasi Informasi Politik Peserta Didik terhadap Hasil Belajar PPKn di SMAN 6 Kabupaten Tangerang. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 995-1004. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1197>
- Haryani, T. N., Amin, M. I., Husna, A. M., & Lestari, S. M. (2024). Penguatan Literasi Politik bagi Generasi Z (Kajian Sebelum Masa Pemilihan Umum 2024). *Jurnal Kapita Sosial Politik*, 1(1), 20-32.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/jksp.v1i1.6>
- Kurniawatik, A. T., Khaerunnisa, K., & Tasya, T. (2021). Melek Information and Communications Technology (ICT) Pada Masyarakat Pedesaan Di Era Globalisasi. *Cebong Journal*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.35335/cebong.v1i1.3>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mufti, M. (2019). *Teori-Teori Politik*. CV Pustaka Setia.
- Muhazir, A. (2020). Strategi Political Marketing Kandidat dalam Pilkada Serentak Periode III di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1-19. <http://ejournal.amikompurwokerto.ac.id/index.php/AGUNA/article/view/1000>
- Mukarom, Z. (2016). ZM_Komunikasi_Politik_2016. In *Komunikasi Politik* (Issue Politik, pp. 3-240). CV Pustaka Setia.
- Purnamawati, N., & Fauzi, E. A. (2023). Strategi Sosialisasi Politik Kepala Desa Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Berbasis Penguatan Kearifan Lokal. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1860-1878.
- Rosit, M., Handa, M. S., & Handayani, S. (2023). Penguatan Literasi Politik Warga Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024. *Innovative: Journal Of Social ...*, 3, 1078-1088. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4825>
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/4825/3480>
- Sabrina, A. R. (2019). Literasi Digital Sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 5(2), 31. <https://doi.org/10.37535/101005220183>
- Siregar, F. S., & Manurung, Y. H. (2023). Literasi Digital Sebagai Upaya Antisipasi Ujaran Kebencian di Media Sosial. *SOMASI: Sosial Humaniora Komunikasi*, 4(1), 68-76. <https://www.jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/somasi/article/view/929>
- Tamrin, U., RS, A. H., Arsyad, A. A. J., Umar, N., & Kurniawan, D. (2024). Analisis Peranan Pemilih Pemula dan Pentingnya Teknologi Digital Untuk Pemilihan Umum 2024 di Indonesia (Studi Kasus: Pemilih Pemula SMA Negeri 20 Makassar). *Journal of Digital Literacy and Volunteering*, 2(2), 52-60. <https://doi.org/10.57119/litdig.v2i2.89>
- Veronika, R., Ginting, B., Arindani, D., Mega, C., Lubis, W., & Shella, A. P. (2022). Literasi digital sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di era globalisasi. *Jurnal Pasopati*, 3(2), 118-122. <https://doi.org/10.14710/pasopati.2021.10869>
- Yuliandari, E., Muchtarom, M., & Widiatmaka, P. (2023). Pendidikan Politik Melalui Penguatan Literasi Digital Dalam Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 11(1), 186. <https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v11n1.p186--205>